

**Judul : PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN PARPOL  
(Studi Tentang Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam  
Kegiatan Parpol Pada Pelaksanaan Pilkada Di Provinsi Jambi Tahun 2005)**

**Bidang Ilmu : Sosial**

**BAB I. PENDAHULUAN**

Jika kita memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, maka mengutip *Larry Diamond, Juan J.Linz dan Seymour martin Lipset*, sedikitnya ada 3 syarat pokok yang harus ada disana, yakni (1) Kompetisi yang sungguh- sungguh dan meluas diantara individu dan kelompok organisasi (terutama parpol) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan afektif, dalam suatu periode tertentu, tetap dan teratur serta tidak melibatkan penggunaan daya pemaksa (*force*); (2) Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara (tanpa mempedulikan ras, etnis, suku, kelas sosial, dan jenis kelamin) dalam pemilihan pemimpin atau proses pembuatan kebijakan, atau sekurang-kurangnya terlibat dalam pemilu yang diselenggarakan secara teratur, adil dan bebas sehingga tidak satupun individu atau kelompok masyarakat (warga negara) merasa dikecualikan, dan (3) Adanya jaminan atau penghargaan terhadap tegaknya kebebasan sipil dan politik, yakni kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi (misalnya organisasi massa atau parpol) yang menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.<sup>1</sup>

Partisipasi politik merupakan salah satu syarat utama demi tegak dan berjalannya demokrasi. Demokrasi juga berarti keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Sedangkan sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan / atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan,

---

<sup>1</sup> Nur Iman Subono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan The Japan Foundation (JFI), Jakarta, 2003.

mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, mencalonkan diri menjadi anggota parlemen, dst<sup>2</sup>.

Dalam realitas politik dibanyak negara termasuk Indonesia, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan. Selama ini jika kita bicara dunia politik, yang terjadi adalah diskriminasi atau peminggiran politik terhadap perempuan didalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Konsep-konsep seperti kompetisi, partisipasi politik serta kebebasan sipil dan politik dalam riel politik ternyata hanya terbatas pada dunia laki-laki (dunia maskulin). Kalaupun perempuan terlibat disana, mereka pun harus masuk dan berperilaku politik dalam dunia laki-laki. Diskriminasi seperti ini lebih didasarkan pada apa yang disebut sebagai keyakinan gender, dan ini menjadi dasar ketidakadilan di berbagai tingkatan mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga lingkungan pemerintahan atau negara.

Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, maka yang terjadi adalah representasi perempuan yang rendah didalamnya. Masalahnya sangat jelas yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis kelamin perempuan yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya pengambilan keputusan dimana hasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengena kepada mereka. Idealnya semua komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil dan bahkan melanggar hak asasi manusia, jika perempuan masih juga dimarginalisasikan atau didiskriminasikan untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal.

Saat ini sebagian besar pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota sedang menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk juga di Provinsi Jambi yang pemilihan Gubernurnya telah selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2005 yang lalu. Tahap pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh parpol yang meliputi penetapan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara merupakan bentuk partisipasi politik. Pilkada langsung membuka banyak peluang bagi partisipasi politik masyarakat. Dengan semakin besar peluang partisipasi politik masyarakat, akan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya.

Agar pelaksanaan Pilkada langsung dapat berjalan dengan baik tentu saja diperlukan partisipasi dari kader-kader parpol untuk ikut menyukseskan jalannya

---

<sup>2</sup> Lihat Prof. Miriam Budiardjo (ed), *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal 1-3.

Pilkada tersebut. Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaannya juga harus melibatkan tidak hanya kader laki-laki parpol saja tetapi kader perempuan parpol juga harus ikut dilibatkan sehingga semua hak perempuan untuk dapat berpartisipasi dibidang politik dan telah mendapat jaminan hukum juga bisa diwujudkan dalam pelaksanaan Pilkada langsung tersebut.

Di Provinsi Jambi cukup banyak terdapat kader perempuan partai politik yang masuk dalam struktur kepengurusan partai, khususnya pada partai-partai peserta Pilkada yaitu parpol yang berhak mengajukan calon kepala daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 59 Ayat 2 UU No.32/2004, yaitu partai yang memiliki 15% suara sah dalam Pemilu DPRD tahun 2004 yang lalu. Gambaran tentang pengurus pada DPD / DPW Parpol di Provinsi Jambi pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I.1**

**Pengurus DPD / DPW Partai Politik Di Provinsi Jambi Tahun 2004**

<b>Nama Partai</b>	<b>Jumlah Pengurus</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>% Perempuan</b>
PNI (Partai Nasional Indonesia) Marhaenisme	12	9	3	25
Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO)	24	20	4	16
Partai Bulan Bintang (PBB)	25	25	-	0
Partai Merdeka (PM)	16	8	8	50
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	71	56	8	11
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	42	30	12	28
Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	13	10	3	23
Partai Nasional Benteng Kemerdekaan (PNBK)	23	20	3	13
Partai Demokrat	30	25	5	16
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	32	28	4	12
Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	17	11	6	35
Partai Persatuann Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNU)	33	29	4	12
Partai Amanat Nasional (PAN)	191	164	27	14
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	99	83	16	16

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	69	65	14	20
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	28	18	10	36
Partai Bintang Reformasi (PBR)	19	18	1	5
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	19	12	7	37
Partai Damai Sejahtera (PDS)	36	34	2	6
Partai Golkar	50	37	13	26
Partai Patriot Pancasila	32	30	2	6
Partai Pelopor	23	10	3	23
Partai Persatuan daerah (PPD)	16	15	1	6

Sumber : Diolah dari Struktur Kepengurusan DPD /DPW Partai Politik Di Provinsi Jambi Tahun 2004

Dari tabel diatas terlihat bahwa cukup banyak terdapat kader perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai politik, dan itu berarti bahwa cukup banyak kader perempuan yang aktif dalam mengikuti kegiatan dalam partainya masing-masing. Dari tabel tersebut juga tampak bahwa jumlah terbesar kader perempuan sebagai pengurus pada DPD/DPW Parpol di Provinsi Jambi terdapat pada partai Golkar, PAN, PDIP, PKB dan PKS dimana kelima partai tersebut juga memperoleh kursi legislatif terbesar di DPRD Provinsi Jambi pada pemilu legislatif tahun 2004 yang lalu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I.2**

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI DPRD PEMILU 2004 – PROVINSI JAMBI**

No	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1	PNI Marhaenisme	24.308	1
2	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO)	12.464	-
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	44.971	-
4	Partai Merdeka (PM)	17.924	-
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	76.393	4
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	14.843	-
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	10.038	-
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	13.546	-
9	Partai Demokrat (PD)	66.561	2

10	PKP Indonesia (PKPI)	17.780	
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	4.156	-
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	3.291	-
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	207.431	8
14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	54.883	4
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	75.019	4
16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	60.273	3
17	Partai Bintang Reformasi (PBR)	47.581	2
18	PDI Perjuangan (PDIP)	144.344	6
19	Partai Damai Sejahtera (PDS)	15.383	-
20	Partai GOLKAR	317.643	11
21	Partai Patriot Pancasila (PPP)	12.096	-
22	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	12.713	-
23	Partai Persatuan Daerah (PPD)	15.533	-
24	Partai Pelopor (PP)	7.764	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.286.307</b>	<b>45</b>

Sumber : KPU Provinsi Jambi Tahun 2004

Namun yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Provinsi Jambi tahun 2005, tampak sedikit kader perempuan yang ikut terlibat dalam aktivitas riil politik pada proses pelaksanaan Pilkada langsung tersebut, terutama pada kegiatan politik pada partai masing-masing. Hal ini mungkin dikarenakan memang dari diri perempuan itu sendiri yang tidak berminat untuk terjun kedalam aktifitas riil politik pada pelaksanaan Pilkada dan kondisi itu juga semakin dipersulit oleh aturan dan pola yang diberlakukan partai yang tentu tidak mudah bagi perempuan untuk dapat menembusnya.

Selain itu keterlibatan kader perempuan di dalam kegiatan partai juga sangat dipengaruhi oleh dana. Tanpa dana yang cukup dan memadai mustahil bagi perempuan untuk bisa ikut secara total di dalam kegiatan partai. Meskipun kadang-kadang kader perempuan bersedia mengeluarkan sejumlah dana sebagai salah satu kriteria untuk dapat dijadikan sebagai bakal calon kepala daerah dari partainya, tapi kurang disupport oleh suami, dan bagi perempuan sulit untuk mengorbankan kepentingan keluarga untuk berpolitik misalnya berkampanye.

Bagi perempuan dukungan dari keluarga terutama dari suami akan memperkuat rasa percaya diri perempuan, dengan arti kata, karena keterlibatan perempuan dalam

kegiatan politik tentu telah ada komitmen tentang urusan rumah tangga dengan suami yang tidak hanya menjadi tugas perempuan, yang apabila perempuan pada suatu waktu tertentu tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakannya maka suami dapat membantu untuk menyelesaikannya. Dengan demikian masalah rumah tangga tidak lagi menjadi alasan bagi perempuan untuk tidak terjun ke dunia politik.

Pola kerja yang diterapkan dalam partai seperti pertemuan dan rapat-rapat perencanaan kampanye untuk Pilkada baik itu disengaja ataupun tidak secara intens dilaksanakan pada malam hari. Itu berarti secara tidak langsung parpol telah membuka peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk bisa dapat mengikuti kegiatan parpol. Namun bagi perempuan hal itu sangat mengganggu jadwal perempuan karena pada saat yang sama ia harus sudah berada dirumah untuk membimbing anaknya belajar. Belum lagi keharusan kampanye keluar daerah dalam rangka memobilisasi dukungan bagi partainya yang dilakukan selama sehari-hari yang membuat perempuan harus meninggalkan keluarga untuk beberapa lama membuat perempuan semakin sulit untuk dapat menghadiri dan mengikutinya.

Kader laki-laki bisa 24 jam dipartai, tapi perempuan tidak, karena merasa bertanggung jawab pada suami dan anak-anaknya. Selain itu untuk urusan partai laki-laki bisa keluar malam, tapi masyarakat menganggap janggal untuk perempuan keluar malam. Karena mungkin saja suami atau anak tidak mengizinkan untuk keluar malam sebab takut mendapat penilaian yang buruk dari masyarakat disekitar tempat tinggal.

Kondisi demikian juga terjadi dalam proses kampanye pilkada di Provinsi Jambi dimana terlihat sedikit sekali kader perempuan partai yang terlibat dalam kegiatan riil dilapangan yang juga tergambar dalam susunan tim kampanye yang dibentuk oleh parpol-parpol pendukung calon kepala daerah masing-masing. Disana terlihat bahwa hanya beberapa orang saja kader perempuan yang ikut terlibat didalamnya. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I. 3**  
**Jumlah Tim Kampanye Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada**  
**Pilkada Di Provinsi Jambi Tahun 2005**

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PARTAI YANG MENDUKUNG	JUMLAH TIM KAMPANYE
1	H. Zulkifli Nurdin dan H. Antony Zeidra Abidin	PAN, GOLKAR, PBB, PNIM, PKS	Laki-laki : 123 Perempuan : 13 Jumlah : 136
2	H. Hasip Kalimuddin Syam dan H. Hr. Arbain	PPP, PKB, PKPB	Laki-laki : 110 Perempuan : 13 Jumlah : 123
3	H. Usman Ermulan dan H. Irsal Yunus	PDIP, PBR	Laki-laki : 43 Perempuan : 5 Jumlah : 48

Sumber : KPU Provinsi Jambi, *Daftar Tim Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi tahun 2005*.

Demikian juga halnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dimana dalam hal ini dibutuhkan saksi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah yang itu berarti berasal dari parpol peserta pilkada. Di sini proses penunjukan saksi dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol dimana dalam proses ini banyak didominasi oleh kader laki-laki sebagai mayoritas dalam partai. Proses penunjukan tentu saja didasarkan pada berbagai kriteria. Dalam proses itu penunjukan banyak ditujukan pada kader laki-laki karena mereka menganggap kinerja dari kader laki-laki lebih unggul dari perempuan karena perempuan memiliki beban ganda seperti tanggung jawabnya terhadap suami dan anaknya dirumah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja untuk ikut terlibat dalam kegiatan partai tersebut. Selain itu kader perempuan sebagai minoritas dalam partai merasa tidak mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan kader laki-laki dengan jumlah yang minoritas tersebut.

Padahal telah ada perjuangan dari gerakan perempuan selama ini yang selain berhasil dalam mendapatkan hak-hak politik yang sama bagi perempuan, juga menghasilkan perubahan dalam pemahaman mengenai politik. Betty Friedan, salah seorang tokoh feminis liberal, dalam bukunya, *The Feminine Mystique*, mengkritik definisi konvensional tentang politik yang hanya diartikan sebagai aktivitas yang berlangsung dalam wilayah institusi publik seperti partai politik, pemerintah, kelompok penekan atau kelompok kepentingan, dan organisasi masyarakat. Sementara itu, politik menurut pengertian yang baru adalah yang juga ‘personal’, atau yang pribadi. *The personal is political*, demikian slogan yang terkenal dari kalangan feminis pada umumnya. Bagi mereka, setiap kegiatan di mana ada relasi kekuasaan, maka itu adalah politik. Relasi tersebut bisa ditemukan dalam wilayah privat maupun publik.<sup>3</sup>

Kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tersebut tentu saja menimbulkan sejumlah pertanyaan yaitu mengapa partisipasi politik perempuan masih rendah walaupun telah ada gerakan feminisme yang bisa menjadi loncatan bagi terwujudnya peningkatan partisipasi politik perempuan. Kondisi demikian berarti disebabkan adanya sejumlah kendala yang menghambat perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik didalam partai khususnya.

Sedikitnya keberadaan kader perempuan terlibat dalam pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari peran partai politik, karena partai politik merupakan salah satu wadah yang berfungsi sebagai tempat bagi perempuan untuk berpartisipasi politik yang mempunyai legalitas untuk mempromosikan kaum perempuan dalam memberikan kontribusinya terhadap jalannya pelaksanaan pilkada tersebut.

Dalam hal ini dengan cukup banyaknya terdapat kader perempuan yang duduk dalam kepengurusan parpol di Provinsi Jambi itu berarti parpol telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai sarana partisipasi politik dan juga telah menerapkan fungsi rekrutmennya. dan ini berarti juga bahwa kendala yang menyebabkan kader perempuan tidak dapat terlibat penuh dalam kegiatan parpol pada saat pelaksanaan Pilkada Langsung di Provinsi Jambi tahun 2005 bukan berasal dari internal parpol tetapi diluar itu yaitu berasal dari internal kader perempuan itu sendiri.

Oleh karena itu sangat perlu kiranya digali lebih dalam lagi kendala apa yang dihadapi oleh diri kader perempuan itu yang menyebabkan kader perempuan partai

---

<sup>3</sup> Ani Widyani Soetjipto, ” *Politik Perempuan Bukan gerhana*”, Penerbit Buku Kompas : Jakarta, 2005, hal.26.



politik tersebut tidak dapat terlibat secara penuh dalam proses pelaksanaan Pilkada langsung di Provinsi Jambi, mengingat Pilkada langsung ini berjalan dengan sukses serta pihak KPU Provinsi sebagai penyelenggaranya mendapatkan banyak pujian dari daerah-daerah lain diluar Provinsi Jambi dan menjadikan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi sebagai percontohan bagi Provinsi lain yang belum dan akan melaksanakan Pilkada<sup>4</sup>. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Jambi umumnya dan KPU Provinsi khususnya karena telah berhasil melaksanakan Pilkada dengan lancar, aman dan sukses. Keberhasilan KPU Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sukses di Provinsi Jambi tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga partai politik sebagai lembaga politik formal yang terlibat dalam tahapan pelaksanaan Pilkada Langsung tersebut.

## **BAB II. RUMUSAN MASALAH**

Dalam membahas permasalahan ini lebih jauh, penulis juga berangkat dari beberapa asumsi berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya. Asumsi itu antara lain :

1. Partisipasi politik yang merupakan salah satu syarat utama untuk tegak dan berjalannya proses demokrasi di daerah ternyata dalam praktek dan kenyataannya kaum perempuan sebagai mayoritas penduduk tidak sepenuhnya terlibat didalamnya.
2. Terdapatnya kemungkinan kendala yang dihadapi oleh kader perempuan untuk dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan parpol dalam rangka pelaksanaan pilkada baik itu yang berasal dari internal parpol maupun dari internal kader perempuan itu sendiri.
3. Dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi terdapat suatu kenyataan yaitu cukup banyak kader perempuan yang masuk dalam struktur kepengurusan partai. Hal ini berarti kendala yang berasal dari internal parpol tidak begitu menghambat partisipasi politik kader perempuan tersebut, dan kecenderungan utamanya adalah kendala dari internal perempuan itulah yang menjadi penghambat perempuan untuk dapat berpartisipasi penuh sehingga hal inilah yang harus digali lebih dalam lagi.

---

<sup>4</sup>Diambil dari Artikel *Harian Jambi Independent* Tgl 28 Juni 2004.

Hal inilah yang membuat munculnya suatu pertanyaan yaitu : *Mengapa kader perempuan parpol sedikit terlibat dalam proses pelaksanaan Pilkada, dan apa yang menjadi kendala internal bagi kader perempuan parpol untuk bisa ikut terlibat penuh dalam pelaksanaan Pilkada tersebut ?*

### **BAB III. TINJAUAN PUSTAKA**

Saat ini cukup banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai perempuan dalam kaitannya dengan permasalahan sosial politik. Di Sumatera barat misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani di bawah Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Jakarta Lembaga Penelitian universitas Andalas pada tahun 2003 yang berjudul Keberadaan Pejabat Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di Pemda Tingkat I Sumatera Barat. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana peran perempuan yang menduduki posisi eksekutif di jajaran pemerintah provinsi Sumatera barat dalam membuat keputusan. Penelitian itu juga mengkaji persentase perempuan yang berperan dalam pengambilan keputusan berikut kendala yang ditemui perempuan untuk membuat perubahan di lingkungan instansinya. Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Barat yang bekerjasama dengan Forum Pengkajian Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat tahun 2004. Penelitian itu mengkaji tentang Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Sumatera Barat Pasca Quota 30%.

Khusus di FISIP Universitas Andalas kajian mengenai perempuan yang berhubungan dengan masalah sosial-politik juga telah banyak dilakukan. Diantaranya Perempuan Dalam Proses Kebijakan Publik oleh Jumiati yang menjelaskan bagaimana keterlibatan perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap tahap proses pembuatan kebijakan di lembaga tersebut<sup>4</sup>. Kemudian Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat, Studi Tentang Rekrutmen Politik kasus PAN, Partai Golkar, PDI-P Sumatera Barat oleh Rahmaida Efif yang mengkaji pola rekrutmen partai politik terhadap anggota baru khususnya perempuan dan relevansinya dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif<sup>5</sup>, dan terakhir Pemberdayaan

---

<sup>4</sup> Jumiati, *Perempuan Dalam Proses Kebijakan Publik*, Skripsi Sarjana FISIP Unand Padang, 2003.

<sup>5</sup> Rahmaida Efif, *Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat, Studi tentang : sistem Rekrutmen Politik Kasus PAN, Partai Golkar, PDIP Sumatera Barat*, Skripsi Sarjana, FISIP Unand, Padang, 2003.

Perempuan dalam Politik, Studi Kasus Partai Golkar di Sumatra Barat secara khusus mengenai pemberdayaan perempuan dalam partai politik<sup>6</sup>.

Penelitian-penelitian tersebut mengkaji tentang perempuan dalam aspek-aspek yang berbeda dalam politik. Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian tentang Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Kegiatan Parpol Pada Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005 belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini memiliki karakteristik tersendiri dari penelitian-penelitian tentang perempuan yang pernah dilakukan sebelumnya.

## **1. Kerangka Konsep**

### **a) Partisipasi Politik**

Partisipasi adalah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas dalam mengeksploitasikan sumber-sumber pembangunan (Dryono, 1983). Partisipasi juga dapat dilihat dari partisipasi kualitatif, dan partisipasi kuantitatif (Djohani, 1996). Partisipasi kualitatif adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam pengambilan keputusan didalam berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada (penilaian dari segi bobot). Sedangkan partisipasi kuantitatif adalah keikutsertaan yang dihitung dari jumlah kehadiran (penilaian keikutsertaan secara fisik).

Sedangkan yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan dari pemerintahan (Soedjono, 1995). Menurut Budiardjo (1996) partisipasi politik juga mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, melakukan kontrak dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Sejalan dengan itu partisipasi politik perempuan menurut Huntington (1994) ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah sehingga kepentingan perempuan dapat tersalurkan dengan baik.

Partai politik dalam sistem demokrasi adalah lembaga politik yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, tak terkecuali aspirasi perempuan. Partai politik juga yang dapat membantu dan mendorong perempuan

---

<sup>6</sup> Indah Adi Putri, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus Partai Golkar di Sumatra Barat)*, Skripsi Sarjana FISIP, Unand Padang, 2004.

dapat dicalonkan atau terpilih untuk masuk dalam lembaga politik formal. Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik khususnya lembaga-lembaga politik formal adalah sebuah realitas politik yang tidak bisa dihindari. Akses dan partisipasi politik perempuan dalam setiap tingkatan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan adalah hak asasi perempuan yang paling mendasar (*fundamental right*)<sup>7</sup>.

Pelaksanaan pilkada langsung merupakan suatu wujud penerapan partisipasi politik. Dengan terlibat dalam partai politik perempuan bisa terlibat juga dalam pelaksanaan Pilkada.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Jambi No.1 tahun 2005 disebutkan juga bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain :

1. Pilkada dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan.
2. Masa persiapan meliputi :
  - a. Pemberitahuan DPRD kepada DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
  - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan.
  - c. Perencanaan penyelenggaraan.
  - d. Pembentukan panitia pengawas.
  - e. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.
  - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Tahap pelaksanaan pilkada meliputi :

- a. Penetapan daftar pemilih.
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- c. Kampanye
- d. Pemungutan suara
- e. Penghitungan suara
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

---

<sup>7</sup> Diambil dalam Nur Iman Subono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan The Japan Foundation : Jakarta, 2003, hal. 40.

3. Penyelesaian, meliputi:
  - a. Laporan KPU Kab/Kota ke KPU Provinsi
  - b. Laporan KPU Provinsi/Kab/Kota ke DPRD
  - c. Laporan KPU Prov/Kab/Kota ke Gubernur/Mendagri dan KPU
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005.
  - e. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.

Tahapan pelaksanaan Pilkada seperti pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara merupakan kegiatan Pilkada yang dilaksanakan oleh parpol sebagai peserta Pilkada. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kader-kader parpol baik laki-laki maupun perempuan yang masuk dalam susunan tim kampanye kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh partainya masing-masing.

Proses pencalonan kepala daerah sebagaimana disebutkan pada pasal 59 ayat 1 yang berbunyi :” Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Sistem pencalonan yang harus melalui pintu parpol juga dapat dicermati oleh ketentuan internal partai dimana pengurus parpol di daerah diharuskan mengkonsultasikan atau meminta persetujuan pengurus pusat sebelum mendaftarkan calon yang akan didukungnya. Partai mewajibkan para pengurus daerah melaporkan daftar nama pasangan calon kepala daerah kepada pengurus di tingkat yang lebih tinggi dalam kaitan penyeleksian kelayakannya. Beberapa nama pasangan bakal calon yang sudah dianggap layak nantinya dikirimkan kembali kedaerah untuk dipilih dan ditetapkan menjadi calon kepala daerah.

Prosedur yang demikian itu menjadikan kader perempuan semakin sulit untuk bisa ikut terlibat di dalam proses tersebut karena dalam mekanisme

rekrutmen bakal calon kepala daerah terdapat sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh kader untuk dapat dijadikan bakal calon. Kriteria tersebut antara lain seperti minimal sudah menjadi anggota partai selama 3 tahun, keaktifan dalam kepanitiaan pada kegiatan yang dilakukan partai, kontribusinya kepada partai baik dalam barang dan uang, dan juga tingkat pendidikan.

Keterlibatan kader perempuan di dalam kegiatan partai yang juga sangat dipengaruhi oleh dana membuat perempuan yang tidak memiliki dana yang cukup dan memadai tidak bisa ikut secara total di dalam kegiatan partai. Meskipun kadang-kadang kader perempuan bersedia mengeluarkan sejumlah dana sebagai salah satu kriteria untuk dapat dijadikan sebagai bakal calon kepala daerah dari partainya, tapi kurang disupport oleh suami, dan bagi perempuan sulit untuk mengorbankan kepentingan keluarga untuk berpolitik misalnya berkampanye.

Dalam pola kerja parpol pada kegiatan kampanye dimana pertemuan dan rapat-rapat perencanaan kampanye untuk pilkada baik itu disengaja ataupun tidak secara intens dilaksanakan pada malam hari. Sekilas hal ini berarti parpol telah membuka peluang yang sama baik kepada kader perempuan maupun laki-laki untuk bisa ikut terlibat dalam proses tersebut. Namun bagi diri perempuan tidaklah demikian, malahan perempuan menjadi semakin sulit mengikutinya karena pada saat-saat tersebut perempuan harus berada di rumah untuk keluarganya. Belum lagi pandangan buruk dari masyarakat sekitar yang akan diterima perempuan yang melakukan aktivitas partai pada malam hari.

Demikian juga halnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dimana dalam hal ini dibutuhkan saksi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah yang itu berarti berasal dari parpol peserta pilkada. Di sini proses penunjukan saksi dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol dimana dalam proses ini banyak didominasi oleh kader laki-laki sebagai mayoritas dalam partai. Proses penunjukan tentu saja didasarkan pada berbagai kriteria. Dalam proses itu penunjukan banyak ditujukan pada kader laki-laki karena mereka menganggap kinerja dari kader laki-laki lebih unggul dari perempuan karena perempuan memiliki beban ganda seperti tanggung jawabnya terhadap suami dan anaknya di rumah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja untuk ikut terlibat

dalam kegiatan partai tersebut. Selain itu kader perempuan sebagai minoritas dalam partai merasa tidak mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan kader laki-laki dengan jumlah yang minoritas tersebut.

Idealnya didalam setiap proses tahapan pelaksanaan Pilkada tersebut perempuan terlibat secara penuh karena keberadaan perempuan dalam institusi politik yang dalam hal ini adalah partai politik haruslah seimbang dengan jumlah riil mereka didalam aktivitas lapangan agar mampu menghasilkan keputusan yang lebih akomodatif terhadap permasalahan perempuan.

#### **b) Kader Perempuan Partai Politik**

Orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan partai politik dinamakan kader parpol. Yang dimaksud dengan kader parpol yaitu sekelompok warga negara yang dididik dalam suatu pendidikan kader dalam organisasi partai politik agar dapat menjadi kekuatan bagi parpol untuk dapat mencapai tujuan parpol tersebut. Kader-kader parpol tersebut tidak lain adalah manusia-manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai commitment kepada dasar-dasar dan cita-cita bangsa.<sup>8</sup>

Seorang kader harus mempunyai kemampuan untuk mendorong terjadinya berbagai perubahan, pembaharuan dan peningkatan kinerja dalam organisasi/partai serta sekaligus dapat berfungsi sebagai penggerak, pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan partai dan posisi kader sebagai anggota masyarakat yang berusaha turut andil dalam kehidupan masyarakat serta berperan sebagai anggota masyarakat yang proaktif. Begitu juga halnya dengan kader perempuan.

Keberadaan kader perempuan dalam partai politik memiliki fungsi antara lain yaitu<sup>9</sup>:

1. Dapat mengubah prioritas politik parpol dan budaya internal dalam parpol. Keberadaan perempuan dalam parpol yang turut mentransformasikan agenda-agenda yang dibicarakan memperlihatkan adanya perubahan budaya internal partai. Pendapat dari kader perempuan

---

<sup>8</sup> Drs. Madiri Thamrin Sianipar, *Pendidikan Politik Bangsa*, Penerbit Sinar Harapan Bangsa : Jakarta, 1984, hal.15.

<sup>9</sup> Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Penerbit buku Kompas : Jakarta, 2005, hal.78.

keluar dengan karakter khas dalam rapat-rapat partai dan justru masukan dari perempuan yang sering didengar dan dijadikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

2. Keterlibatan perempuan sebagai pengurus harian partai akan mampu mempengaruhi pembuatan keputusan dalam partai.
3. Pencapaian dan hasil partisipasi perempuan secara aktif tidak saja dalam merubah demokrasi internal dalam partai tetapi juga dalam program-program yang dilakukan oleh parpol terutama dalam arena kesejahteraan keluarga, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, lapangan kerja (ekonomi), dst.
4. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat seperti diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi di hadapan hukum, dan berbagai bentuk diskriminasi yang lain.

Divisi kajian perempuan CETRO (*Center for Electoral Reform*) merumuskan bahwa sangat penting bagi perempuan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik, karena :

1. Perempuan memiliki pengalaman khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Seperti kebutuhan akan isu-isu kesehatan reproduksi, isu-isu kepedulian terhadap anak ataupun isu-isu kesejahteraan keluarga, isu-isu kepedulian terhadap anak ataupun isu-isu kekerasan seksual dimana korban paling banyak adalah kaum perempuan.
2. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi di masyarakat, seperti diskriminasi ditempat kerja dimana upah pekerja laki-laki sering lebih tinggi daripada upah pekerja perempuan meski dengan jam dan porsi kerja yang sama, diskriminasi dihadapan hukum. Misalnya kasus perceraian, tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan yang sering tidak seimbang.



3. Sebagai pengambil keputusan perempuan dapat membuat perubahan-perubahan, seperti perubahan cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara anti kekerasan, perubahan kebijakan dan peraturan-peraturan undang-undang yang ikut memasukkan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan sebagai bagian dari agenda nasional.
4. Terpenuhinya azas keterwakilan, karena perempuan berjumlah lebih dari separuh total jumlah penduduk Indonesia maka meminggirkan perempuan Indonesia dalam proses politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia.

Hal ini diperkuat juga oleh *Nur Iman Subono* dalam bukunya tentang “*Perempuan dan Partisipasi Politik*” yang menyebutkan ada beberapa alasan mengapa begitu penting perempuan terlibat dalam partai politik, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>10</sup>.

- a. Sebuah pemerintah oleh laki-laki untuk laki-laki tidak dapat mengklaim menjadi sebuah pemerintah oleh rakyat untuk rakyat (*A government by men can't claim to be a government for the people by the people*).

Pernyataan ini pada dasarnya merujuk kepada sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh *Inter-Parliamentary Union Council* pada April 1992. Dalam salah satu kalimat dalam resolusi tersebut dikatakan bahwa, “Konsep demokrasi hanya akan memiliki arti dinamis dan sejati pada saat partai politik dan kebijakan atau legislasi nasional diputuskan oleh laki-laki dan perempuan bersama-sama secara adil dengan mempertimbangkan kepentingan dan bakat dari kedua belah pihak tersebut dalam masyarakat”.

Sebagai sisi nyatanya, kehidupan demokrasi yang sedang dan sudah berlangsung di berbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang, sejauh ini belum bisa dikatakan sebagai cerminan pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat karena nyatanya kalangan perempuannya memang tidak banyak terlibat didalamnya.

---

<sup>10</sup> Nur Iman Subono, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Yayasan Jurnal Perempuan dan The Japan Foundation : Jakarta, 2003, hal 30-33.

- b. Perempuan pada dasarnya adalah pelaku politik yang memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dengan lebih baik. Namun yang terjadi selama ini umumnya segala keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu dan persoalan-persoalan perempuan selalu menjadi agenda politik laki-laki.
- c. Perempuan membawa gaya dan nilai politik yang berbeda (*Women bring a different style and values to politics*).

Negara dan masyarakat yang tidak melibatkan kalangan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sebetulnya mereka telah mencabut atau menyalahkan diri mereka sendiri atas aset kemampuan serta gaya pengambilan keputusan yang berbeda.

Kemudian dalam buku *Women and Empowerment : Participation and Decision Making* oleh Marilee Karl (ed) mengungkapkan bahwa berbagai penelitian perempuan dan politik memperlihatkan dua hal yang menjadi ciri budaya politik perempuan yaitu <sup>11</sup>:

1. Pengalaman perempuan (*women's experience*), khususnya sebagai ibu dan peranan tradisional mereka didalam rumah dan keluarga, menyebabkan mereka tampaknya lebih peduli dibandingkan dengan laki-laki dalam hal kebutuhan orang lain. Hal ini yang mendorong mereka bekerja dalam upayanya untuk peduli terhadap kebutuhan hak-hak wanita dan anak-anak, orang-orang cacat, kaum manula, kelompok minoritas, dan kelompok-kelompok marjinal lainnya. Kinerja kaum wanita pun umumnya tidak bersifat militeristik dan menjadi pendukung yang kuat atas soal-soal perdamaian dan non kekerasan.
2. Perempuan diparlemen umumnya lebih bersifat realistik dan praktis dalam pekerja-pekerja mereka. Mereka lebih mampu melakukan inisiatif perubahan dalam metode dan sasaran, dan juga bersedia untuk bekerja bersama-sama. Umumnya mereka pun selalu mempertimbangkan dengan hati-hati akibat-akibat yang muncul terhadap orang lain atau masyarakat pada umumnya dari berbagai keputusan yang mereka hasilkan atau promosikan.

---

<sup>11</sup> · *Ibid*, hal 33-34.

Walaupun saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi, representasai dan akuntabilitas diberi makna yang sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini. Selama ini di Indonesia kita mendapati bahwa sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri.

Perempuan sebagai satu kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan. Dalam kerangka demokrasi yang representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat. Dominasi penafsiran, dan marginalisasi kelompok tertentu tidak dibenarkan. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender.

Walaupun saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi, representasai dan akuntabilitas diberi makna yang sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga

negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini. Selama ini di Indonesia kita mendapati bahwa sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri.

Perempuan sebagai satu kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan. Dalam kerangka demokrasi yang representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat. Dominasi penafsiran, dan marginalisasi kelompok tertentu tidak dibenarkan. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender.

### **c. Kendala-kendala Terhadap Partisipasi Politik Perempuan**

Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat rendah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan diantaranya<sup>12</sup> :

1. Kondisi sosial budaya, dan psikologis yang masih sangat kuat menganggap perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dengan ideologi pembagian peran publik dan domestik.
2. Birokrat partai yang didominasi oleh laki-laki cenderung tidak memberi peluang kepada perempuan dalam penetapan nomor urut caleg. Penetapan nomor urut ditentukan oleh pimpinan partai yang pada umumnya laki-laki.

---

<sup>12</sup> Laporan Penelitian *Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik*, oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Prop. Sumbar kerjasama dengan Forum Pengkajian Pemberdayaan Perempuan Sumbar, tahun 2004.

3. Adanya tafsir agama yang melarang perempuan berkecimpung di ruang publik.
4. Faktor internal perempuan itu sendiri terkait dengan kualitas SDM, pengetahuan, kecakapan berorganisasi, pendidikan, sikap mental, dan pemahaman tentang hak-hak politik yang masih rendah.
5. Kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan perempuan. Kalaupun ada, masih sangat lemah dalam sosialisasi, dan implementasinya.
6. Kurangnya penyajian, dan promosi aktivitas perempuan di bidang politik dibandingkan aktivitas politik laki-laki.

Sikap mental merupakan salah satu kendala perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Sehubungan dengan itu terdapat juga sejumlah kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri serta kelompok perempuan dalam perubahan sosial antara lain sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Kesulitan perempuan untuk menghilangkan perasaan malu dan takut salah yang merupakan akibat dari struktur budaya. Akibatnya, perempuan sukar menemukan identitas dirinya sebagai pribadi.
2. Ambisi pribadi yang didorong oleh emosi yang tidak terkendali akan mewujudkan persaingan yang tidak sehat di kalangan perempuan itu sendiri.
3. Pandangan stereotip telah merasuk ke dalam mental perempuan, menyebabkan perempuan kurang mampu berpikir tajam dan jernih, sehingga perempuan kerap ditinggalkan dalam pengambilan keputusan.
4. Kurang berani menerima kekuasaan, apalagi merebut kekuasaan.
5. Lingkungan menciptakan perempuan sebagai makhluk pemelihara yang melayani segala kebutuhan hidup, khususnya lewat lingkungan keluarga. Oleh karena itu, perempuan bermental sebagai makhluk yang dependen.
6. Berbagai kelainan jiwa mudah hinggap dalam diri perempuan, seperti keterasingan diri, rendah diri yang berlebihan, sikap tertutup yang ekstrem, dan sebagainya.

---

<sup>13</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Indonesiatara : magelang, 2004, hal.52.

7. Ketidakmampuan menjalin persatuan yang solid karena tidak dapat mengendalikan rasa iri dan cemburu, sehingga mudah bercerai berai.
8. Kurang berminat dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan lebih tertarik pada keterampilan motorik.
9. Kurang menyadari kekuatan perempuan sebagai kelompok yang sebenarnya dapat membuat gerakan-gerakan perubahan dalam masyarakat.
10. Cenderung menciptakan dunianya sendiri yang tertutup, karena merasa lebih aman.

Kelemahan-kelemahan yang ada pada diri perempuan tersebut kemungkinan disebabkan oleh struktur biologisnya. Laki-laki dan wanita masing-masing memiliki hormon khusus dan ciri biologis tertentu.

Berkaitan dengan kelemahan fisik wanita, maka dipastikan bahwa struktur biologis wanita memiliki kekuatan yang lebih lemah dan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan pada umumnya bersifat labil (*instabilite*) sehingga tidak mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang ingin ia wujudkan karena ketidakmampuannya menguasai diri sendiri dan mempertahankan aktivitasnya.

Hilangnya kepercayaan diri wanita telah menghalangi dirinya untuk produktif di berbagai bidang. Selain itu wanita hanya berminat pada kerja lapangan yang tidak membutuhkan aktivitas akal. Menurut Heymans, hal itu disebabkan karena berfikir abstrak dan serius merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi wanita pada umumnya. Mereka biasanya hanya puas dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan perasaan dan sifat instinktifnya. Fungsi keibuan wanita membuatnya harus berlaku lebih perasa dan cepat tanggap terhadap stimulus perasaan dibanding laki-laki.

Kemampuan instuisi banyak mendorong wanita untuk mengambil keputusan cepat yang tidak berlandaskan akal atau perasaan. Perasaan kewanitaan atau logika khusus wanita menggerakkan sifat kehidupan psikisnya, karena kedudukannya sebagai makhluk yang biasanya berinteraksi dengan manusia, bukan dengan pikiran dan prinsip umum. Laki-laki pada umumnya senang menerapkan prinsip umum, sedangkan wanita hanya tahu tentang situasi khusus.

Logika wanita adalah logika yang tidak mengingkari realitas, atau sebagaimana pendapat banyak orang, adalah logika yang lebih banyak memperhatikan individu dibanding realitas. Jadi, untuk menafsirkan perilaku wanita, kita tidak cukup dengan menganalisis organ tubuhnya atau menafsirkan hubungannya dengan berbagai fungsi tubuh.

Perilaku moral wanita dipengaruhi lingkungan dan pendidikan. Struktur biologis berperan penting karena merupakan dasar bagi sebagian besar perilaku wanita. Sebagian besar perbedaan yang ada antara laki-laki dan wanita baik dari sisi kemampuan rasional dan produk pemikiran, disebabkan oleh tidak seimbangnya kesempatan dan kebutuhan wanita terhadap dirinya serta masyarakat<sup>14</sup>.

Berbagai kendala internal diri perempuan tersebut semestinya harus dapat diatasi oleh diri perempuan tersebut, karena pada dasarnya kendala tersebut bersifat umum dan terdapat pada hampir semua diri perempuan, sehingga akan menjadi lebih mudah lagi untuk mengidentifikasinya. Namun kenyataan yang terjadi adalah perempuan tersebut kurang memiliki suatu keinginan untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri dengan cara mengantisipasi semua kendala dan hambatan yang menghadang gerakannya untuk aktif dalam dunia politik.

#### **BAB IV. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan partisipasi politik kader perempuan parpol dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi Tahun 2005.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi kader perempuan parpol untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan parpol pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung di Provinsi Jambi Tahun 2005 terutama kendala yang berasal dari internal kader perempuan itu sendiri.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kader perempuan dan parpol dalam mengantisipasi kendala tersebut untuk dapat meningkatkan partisipasi politik kader perempuan.

---

<sup>14</sup> DR. Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, Pustaka Hidayah : Bandung, 2005, hal.16.

## **BAB V. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian dan Pendekatan**

Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.

Tipe ini diharapkan dapat memberi gambaran secara mendalam tentang partisipasi politik kader perempuan dalam kegiatan parpol pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005 serta menjelaskan kendala yang dihadapi kader perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan parpol pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk menjelaskan dan memberikan gambaran tentang fenomena sosial yang ingin diteliti secara mendalam. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* seperti yang dikutip oleh *Moleong*, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati<sup>15</sup>.

Alasan digunakannya metode ini yaitu karena kurangnya partisipasi politik kader perempuan parpol dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Jambi merupakan suatu fenomena sosial yang perlu diteliti secara mendalam, karena cukup banyak kader perempuan yang duduk dalam kepengurusan parpol tersebut tetapi pada kegiatan riilnya kader perempuan tersebut tidak terlibat secara penuh dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Provinsi Jambi tahun 2005.

Dengan pendekatan kualitatif akan didapatkan nantinya data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati yang dapat menggambarkan bagaimana bentuk partisipasi politik kader perempuan parpol didalam kegiatan parpol pada pelaksanaan pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh data-data statistik yang didapat dari dokumentasi.

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung 1997, hal 3.



## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud tertentu. Maksud dari wawancara ini menurut *Lincoln* dan *Guba* antara lain : merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian<sup>16</sup>.

Menurut *Masri* wawancara adalah salah satu bagian terpenting dalam penelitian, karena tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung penelitian dimana hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hasil wawancara<sup>17</sup>. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan satuan wawancara<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini model wawancara yang dipakai adalah wawancara tak terstruktur. Menurut *Moleong* wawancara tak terstruktur dilakukan dengan alasan sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Jika pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada seseorang objek tertentu. Dalam penelitian ini pewawancara ingin menanyakan kepada informan perempuan yang masuk dalam struktur kepengurusan parpol, bagaimana bentuk pelaksanaan partisipasi politik kader perempuan dalam parpol dalam Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005.
2. Apabila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Dalam penelitian ini pewawancara menemukan suatu keadaan yaitu kurangnya kader perempuan parpol berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi.
3. Apabila pewawancara tertarik untuk mengungkapkan motivasi, maksud, atau penjelasan dari responden. Dalam hal ini peneliti ingin mendapatkan penjelasan dari informan tentang bagaimana bentuk pelaksanaan

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> <sup>1</sup> *Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES Jakarta : 1989*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Lexy J Moleong, Op Cit, hal 139.*

partisipasi politik kader perempuan parpol dalam Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005.

4. Apabila ia mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu. Dalam hal ini peneliti ingin mengungkapkan apa yang menjadi kendala bagi kader perempuan parpol untuk ikut berpartisipasi politik dalam Pilkada di Provinsi Jambi.

Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam (*recorder*) untuk merekam hasil wawancara, karena keterbatasan kemampuan peneliti sebagai manusia, sulit untuk menyimak dan mencatat secara detail hasil sebuah wawancara.

#### **b. Dokumentasi**

Selain melakukan wawancara peneliti juga menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jambi ( KPUD), Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) Partai Politik di Provinsi Jambi untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dan juga sebagai dasar acuan dalam melakukan wawancara dan mengumpulkan data-data lainnya yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan partisipasi politik kader perempuan dalam kegiatan parpol pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2005.

### **3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis**

Pada tingkat analisis ini proses pengumpulan data terarah kepada individu-individu yang mengenali fenomena penelitian atau terkait dengan keanggotaan dalam kelompok atau organisasi. Data fenomena penelitian diperoleh hanya terfokus pada subyek yang terkait dengan keanggotaan dalam kelompok atau organisasi yang dalam hal ini ini adalah kaum perempuan di Provinsi Jambi yang aktif di partai politik. Di samping itu peneliti juga memilih kaum laki-laki yang terlibat didalam partai politik.

Lokasinya adalah pada sekretariat DPD / DPW I Partai Politik di Provinsi Jambi yang beralamat di kota Jambi.

#### 4. Tata Cara Pemilihan Partai untuk Analisis

Pemilihan partai sebagai analisis ditentukan berdasarkan teknik Purposive sampling, yaitu pemilihan unit analisis dilakukan secara sengaja dengan kriteria dan tujuan yang jelas. Dalam penelitian ini yang menjadi analisis adalah partai politik peserta Pilkada Tahun 2005 di Provinsi Jambi yang berhak mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2004 yang lalu dan persentase kader perempuannya paling banyak dalam struktur kepengurusannya pada tahun 2005 yaitu pada saat Pilkada tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan teknik purposive tersebut maka ditetapkanlah 5 partai politik sebagai sample dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Partai PAN, dengan alasan yaitu partai ini pada pemilu legislatif tahun 2004 memperoleh 207.431 dari 1.286.307 total suara keseluruhan atau memperoleh 8 kursi di DPRD Provinsi Jambi sehingga berhak mengajukan calonnya pada Pilkada Provinsi Jambi dan partai ini juga dalam kepengurusannya pada tahun 2005 memiliki persentase terbesar kader perempuan yang masuk dalam struktur kepengurusan partai yaitu sebesar 14% atau sebanyak 27 orang dari 191 orang total keseluruhan pengurus partai dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya.
- 2) Partai GOLKAR, dengan alasan partai ini memperoleh suara sebesar 317.643 dari total 1.286.307 atau memperoleh 11 kursi di DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Legislatif tahun 2004 sehingga partai ini berhak mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2005 Provinsi Jambi. Selain itu partai ini juga dalam kepengurusannya pada tahun 2005 memiliki persentase terbesar kader perempuan yang masuk dalam struktur kepengurusan partai yaitu sebesar 15 % atau sebanyak 11 orang dari 73 orang total keseluruhan pengurus partai.
- 3) Partai PDI-P, dengan alasan yaitu partai ini juga memperoleh suara sebesar 144.344 suara atau memperoleh 6 kursi di DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Legislatif tahun 2004 sehingga partai ini berhak mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2005, selain itu partai ini juga memiliki

persentase sebesar 36 % kader perempuan atau sebanyak 14 orang dari 38 orang pengurus yang masuk dalam struktur kepengurusan pada tahun 2005.

- 4) Partai PKB, dengan alasan partai ini memperoleh sebesar 75.019 suara atau memperoleh 4 kursi di DPRD Provinsi Jambi pada pemilu Legislatif tahun 2004 sehingga partai ini berhak mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2005 di Provinsi Jambi. Selain ini partai ini juga memiliki 31 % kader perempuan atau sebanyak 15 orang dari 47 orang yang masuk dalam kepengurusan partai tahun 2005.
- 5) Partai PKS, dengan alasan yaitu partai ini memperoleh 60.273 suara atau memperoleh 3 kursi pada DPRD Provinsi Jmabi pada Pemilu Legislatif tahun 2004 sehingga berhak ikut mengajukan calon kepala daerah pada Pilkada tahun 2005 di Provinsi Jambi. Selain itu partai ini memiliki 20 % kader perempuan atau sebanyak 13 orang dari 65 orang yang masuk dalam kepengurusan parati pada tahun 2005.

## **5. Pemilihan Informan**

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), dimana peneliti menentukan sendiri informan kunci dan informan biasa dengan alasan subyek telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi informasi yang dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik. Selain itu informan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah kegiatan partai politik dan pelaksanaan Pilkada. Dengan teknik pengumpulan data yang demikian maka penelitian ini mengandalkan sumber-sumber data sebagai berikut :

### **1. Informan Biasa**

Informan ini fungsinya adalah untuk mendapatkan data-data sekunder tentang partai politik yang bersangkutan. Selain itu informan ini juga diandalkan untuk melakukan identifikasi terhadap informan kunci yang akan penulis lakukan dengan beberapa orang.

Informan biasa ini terdiri dari kader perempuan yang sudah cukup lama terlibat didalam kegiatan 5 partai politik tersebut dan juga kader laki-laki yang

menduduki jabatan tertentu dalam kepengurusan partai masing-masing. Informan ini diasumsikan masih terlibat secara penuh / aktif pada lingkungan atau kegiatan parpol.

## 2. Informan Kunci

Informan ini fungsinya adalah untuk mendapatkan data primer yaitu yang akan penulis gunakan untuk menganalisa data yang berkenaan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Informan tersebut adalah para kader perempuan yang menjadi pengurus partai di Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) / Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik di Provinsi Jambi karena kegiatan partai di daerah biasanya banyak dilakukan oleh DPD Parpol di Provinsi. Informannya adalah salah satu kader perempuan parpol yang masuk dalam struktur kepengurusan partai dan pernah maju sebagai caleg dalam pemilu legislatif tahun 2004 dan seorang lagi adalah kader perempuan parpol yang masuk dalam struktur kepengurusan parpol tetapi tidak pernah maju sebagai caleg dalam pemilu legislatif tahun 2004. Alasannya subjek ini telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan parpol dan menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan dan kegiatan parpol tersebut.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami<sup>20</sup>.

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisis menurut kemampuan penulis dan sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, maka penulis dituntut untuk membuat gambaran dan penjelasan yang kongkrit dari hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana proses analisis dimulai dari menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yang

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 103

dalam hal ini data-data yang berasal dari DPD/DPW Parpol Provinsi Jambi dan KPU Provinsi Jambi, dan hasil wawancara dari para informan penelitian. Yang kemudian diklarifikasikan dan diinterpretasikan kemudian ditelaah sesuai dengan unit pembahasan yang telah diteliti sehingga diperoleh jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan.

Metode penganalisaan data yang digunakan adalah metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Dalam penelitian kualitatif informasi emik merupakan pandangan informan dan informasi etik merupakan pandangan peneliti. Kedua informasi ini tidak hanya dapat ditafsirkan menurut metode, teknik, dan pandangan peneliti sendiri, tetapi juga disertai dengan literatur yang ada. Selanjutnya dari pandangan etik dan emik ini diakhiri dengan membuat suatu penjelasan tentang permasalahan penelitian sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

## **7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk memeriksa keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu<sup>21</sup>.

Teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

---

<sup>21</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, 1996, Hal 178.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

## **BAB VI. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kendala Kader Perempuan Berpartisipasi Penuh Dalam Kegiatan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pilkada**

Keterlibatan kader perempuan partai politik dalam proses pelaksanaan pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Namun perempuan tersebut tidak dapat berpartisipasi secara penuh karena dipengaruhi oleh beberapa kendala. Yang dimaksud kendala adalah hal-hal yang menahan atau merintanginya terjadinya suatu proses. Dalam penelitian ini, kendala yang dimaksud adalah hal-hal yang menahan atau merintanginya kader perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pelaksanaan pilkada pada partainya masing-masing.

Kendala yang dihadapi oleh kader perempuan tersebut umumnya berasal dari diri perempuan itu sendiri, karena pada dasarnya partai politik telah memberikan kesempatan yang sama bagi kader perempuan untuk dapat terlibat penuh dalam kegiatan partai terutama pada pelaksanaan pilkada di Provinsi Jambi ini.

Berikut ini penjabaran berbagai kendala yang dihadapi oleh kader perempuan untuk dapat terlibat penuh dalam kegiatan partai dalam rangka pelaksanaan pilkada langsung di Provinsi Jambi tahun 2005 dalam beberapa proses tahapan pelaksanaannya yaitu sebagai berikut ;

#### **1. Kendala Pada Tahap Penetapan Dan Pendaftaran Calon Kepala Daerah**

Tahapan pelaksanaan pilkada seperti pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dilaksanakan oleh partai politik peserta pilkada. Di dalam partai Golkar proses ini dilakukan dengan mengadakan rapat mulai dari pengurus anak cabang, ranting hingga pengurus daerah untuk menetapkan siapa yang bakal dimajukan sebagai calon dari partai Golkar.

Di partai ini salah satu kader perempuan sempat maju sebagai bakal calon yaitu ibu Hj. Azizah Daqyati Uteng Suryadiatna, namun dalam konvensi yang diadakan oleh

pengurus pusat partai gilkar di Jakarta akhirnya memutuskan untuk mencalonkan H. Antony Zeidra Abidin sebagai pasangan calon kepala daerah dari partai golkar berpasangan dengan calon kepala daerah dari PAN yaitu H. Zulkifli Nurdin.

Salah seorang kader perempuan partai yang mengikuti perkembangan dan alur penetapan calon kepala daerah dari partainya menyatakan bahwa banyak hal yang telah ia lakukan untuk mendukung bakal calon dari kader perempuan itu untuk bisa maju sebagai calon dari partainya tersebut. Ia berusaha mengumpulkan suara dan tanda tangan sebagai dukungan dari kader dan simpatisan partai. Hal ini sebagaimana pernyataannya berikut:

*“ di partai kami salah satu kader perempuan sempat maju dalam pengajuan bakal calon. Dari awal saya memberikan dukungan yang penuh terhadap calon perempuan ini. Saya ikuti setiap rapat dan pertemuan partai, sebanyak mungkin aya kumpulkan terus suara dan tanda tangan dari kader lain untuk ikut juga mendukung calon dari kader perempuan tersebut” (Fatimah Syamsir, Golkar)*

Di PAN proses pencalonan berjalan lurus tidak seperti yang terjadi di partai golkar yang akhirnya beralih arah mencalonkan kader laki-laki. Di PAN sejak awal memang telah mencalonkan H. Zulkifli Nurdin sebagai calon dari partainya, karma calon tersebut mendapat banyak dukungan mulai dari arus bawah partai hingga tingkat pengurus daerah.

Dalam proses pencalonan ini para kader perempuan dan laki-laki partai bersama-sama menggalang dukungan dari para kader dan simpatisan partai untuk memberikan dukungan terhadap calon dari partai mereka tersebut. Dan karena calon tersebut sebelumnya memang menjabat sebagai gubernur Jambi, maka tidak begitu sulit memperkenalkannya lagi kepada kader, simpatisan maupun masyarakat, karena mereka tentu saja sudah mengenal gubernur mereka sebelumnya.

Hal ini tergambar dalam pengakuan salah satu kader perempuan PAN berikut :

*“tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan dukungan dari kader, simpatisan dan masyarakat, karena pada umumnya mereka juga mendukung penalonan kembali H. zulkfili Nurdin tersebut sebagai pemimpin rakyat Jambi kedepan nantinya” (Nurmawati, PAN)*



Dari pernyataan tersebut tampak wujud partisipasi yang ditunjukkan oleh kader perempuan dan kerja kerasnya menggalang dukungan bagi calon dari partainya tersebut. Mereka juga tidak segan-segan untuk mendatangi perkumpulan-perkumpulan yang ada di masyarakat agar memberikan dukungan kepada calon dari partainya tersebut.

Di PDIP proses rekrutmen calon kepala daerah dilakukan dengan cara setiap anak cabang maupun ranting mengirimkan masing-masing calonnya untuk kemudian dikirimkan ke pusat untuk diambil keputusan oleh pusat, mana yang berhak maju sebagai calon kepala daerah dari PDIP. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh pengurus dari partai ini, sebagai berikut ;

*“setiap anak cabang maupun ranting mengirimkan masing-masing calonnya untuk kemudian dikirimkan ke pusat untuk diambil keputusan oleh pusat bahwa calon mana yang berhak maju sebagai calon kepala daerah dari PDIP. Dalam proses ini tentusaja kader perempuan diikutsertakan juga dalam penentuan bakal calon kepala daerah”.* (Agus Suyandi Roni, PDIP)

Tampak disini bahwa pengurus pusat di partai ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam meloloskan bakal calon yang diajukan dari pengurus daerah. Meskipun dalam proses ini mengajukan calon kader perempuan, namun tetap saja keputusan berada di tangan pengurus pusat. Disini lobi-lobi terhadap pimpinan juga sangat menentukan proses seleksi ini akan tetapi tidak semua kader perempuan mau melakukannya karena mereka menganggap bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan lobi-lobi seperti itu. Hal ini berdasarkan pengakuan dari salah seorang kader perempuan dari partai ini ;

*“saya tidak akan mampu melakukan lobi-lobi seperti yang dilakukan oleh salah seorang kader perempuan lain, karena saya merasa itu bukan sifat saya, saya tidak punya kemampuan untuk itu”.* (Dorni Safarini, PDIP)

Setelah proses penetapan calon kepala daerah dari masing-masing parpol selesai dilaksanakan, parpol-parpol tersebut mulai mengadakan koalisi dengan partai lain untuk dapat mengusung calon yang akan didaftarkan baik sebagai calon kepala daerah maupun sebagai wakil kepala daerah. Namun dalam pencalonan ini, kendala internal dari kader perempuan pada tahap ini yaitu terkait dengan persoalan psikologis yang sering

dirasakan oleh kader perempuan seperti kesulitan membagi waktu dan memilih untuk dapat mengikuti antara kegiatan partai dan rumah tangga atau keluarga.

Selain itu masalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh kader perempuan untuk dapat terlibat penuh dalam kegiatan partai juga merupakan kendala yang sangat mereka rasakan dan sangat menghambat aktivitas mereka dalam partai, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat hadir dalam pertemuan-pertemuan ataupun rapat partai yang umumnya dilakukan pada malam hari dan membuat mereka tidak bias menghadiri rapat dan mempengaruhi keputusan rapat tersebut, karena memang mereka kesulitan membagi waktu antara mengikuti kegiatan partai atau tetap berada ditengah-tengah keluarganya.

Factor lain yang mempengaruhi keterlibatan kader perempuan dalam partai yakni karena rendahnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak politiknya dan kurangnya wawasan dan pemahaman perempuan tentang politik sehingga menyebabkan perempuan jauh tertinggal dari laki-laki. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Risan dari PAN, menyatakan;

*“masyarakat disini rata-rata awam. Selain itu ada beberapa daerah yang tidak ingin perempuan itu maju, karena hal itu sudah lama mengakar budaya seperti itu. Perempuan tidak boleh untuk melangkahi laki-laki. Dengan adanya pemahaman seperti itu maka tentu saja hal ini menghambat gerak perempuan untuk dapat mengikuti kegiatan di parpol apalagi dalam pencalonan”. (Risna, PAN)*

Selain itu untuk bisa maju dalam suatu pemilihan kader perempuan harus dihadapkan pada masalah dana yang menjadi modal awal bagi kita untuk bisa maju baik itu sebagai caleg maupun sebagai calon kepala daerah. Apalagi dalam pilkada langsung sekarang ini menggunakan dana pribadi, bukan dari partai, maka secara otomatis bagi calon yang hendak maju dalam pilkada harus menyiapkan sejumlah dana yang cukup besar untuk mendanai kampanye dan kegiatan lainnya dalam rangka penggalangan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

Sedangkan kader perempuan pada umumnya adalah seorang istri atau ibu rumah tangga yang tidak semuanya bekerja, dalam hal ini tentu saja kader perempuan tersebut

kesulitan untuk dapat mengumpulkan sejumlah dana yang besar untuk bisa maju dalam pemilihan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan salah satu partai;

*“pada saat pemilu legislative perempuan dibatasi, apalagi untuk pilkada peluang tidak diberikan sama sekali. Di Jambi perempuan tidak ada yang diberi peluang untuk maju dalam pilkada, karena banyak sekali factor untuk maju dalam pilkada, karena sekarang pemilihan langsung, kocek pribadi, siap nggak kita, karena kalau kita tidak punya duit sendiri pasti kita pinjam dari orang, dan kalau kita kalah kita harus bayar, menangpun tetap juga harus dibayar, dari mana dapat duitnya”. (Lily Priorita, PDIP)*

Mengenai masalah dana ini, kader perempuan dari PKB mengungkapkan bahwa untuk pengorbanan materi memang harus dipertimbangkan dengan baik, karena bagi perempuan masih banyak hal lain didalam rumah tangga yang harus dipikirkan soal materi ini, mereka harus bisa berpikir logis untuk bisa mengorbankan sejumlah materi yang besar untuk bisa maju dalam suatu pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa kader perempuan tersebut belum memiliki kesiapan mental untuk mengambil resiko dalam setiap usaha politik yang dilakukannya. Berikut kutipan wawancaranya;

*“untuk sukses diperlukan pengorbanan materi yang besar, dan bagi perempuan itu menjadi suatu persoalan karena banyak hal lain yang harus dipikirkan lagi”. (Vivi Yumarni, PKB)*

Selain itu kendala psikologis yang juga kerap kali dirasakan oleh kader perempuan yaitu diantaranya seperti kesulitan untuk menghilangkan perasaan malu, tidak percaya diri dan merasa rendah diri, dan hal tersebut sangat sulit untuk mereka hilangkan. Seorang kader perempuan dari PDIP mengakui bahwa untuk melakukan suatu usaha politik pada tahap penetapan calon dari partai lobi-lobi dengan pimpinan partai sangat menentukan hasilnya nanti, dan untuk dapat melakukan usaha tersebut mereka mengaku tidak suka melakukan hal seperti itu. Seperti yang dipaparkannya;

*“kalau di partai itu kan yang dilakukan adalah lobi-lobi, adu argumentasi, nah siapa yang bisa atau pandai melobi maka dia yang menang, sedangkan perempuan kan umumnya tidak suka melobi-lobi seperti itu, mereka hanya mengharap orang menilai*

*kerja mereka berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan, begitu juga halnya dengan saya". (Dorni Safarini, PDIP)*

Dari semua paparan diatas tampak bahwa kendala yang paling sering dirasakan oleh kader perempuan dalam tahap ini yaitu kesulitan kader perempuan untuk membagi waktu dan untuk apat memilih antara mengikuti kegiatan partai atau mengurus rumah tangga. Selain itu kendala psikologis yang juga kerap kali dirasakan oleh kader perempuan yaitu diantaranya seperti kesulitan untuk menghilangkan perasaan malu, tidak percaya diridan merasa rendah diri, dan hal tersebut sangat sulit untuk mereka hilangkan.

## **2. Kendala Pada Tahap Pelaksanaan Kampanye Pilkada**

Setelah masing-masing pasangan calon dari masing-masing parpol peserta pilkada didaftarkan ke KPUD, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik yaitu menggalang dukungan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat melalui kegiatan kampanye dalam berbagai bentuk, seperti tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, rapat umum, debat public dan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Seperti di PAN kader perempuan partai yang tergabung dalam PUAN (perempuan amanah) yaitu sebuah badan otonom dibawah naungan partai yang berfungsi mewadahi aktifitas kader perempuan dalam partai melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah, seperti mendatangi organisasi perempuan didesa-desa seperti PKK untuk menyampaikan visi dan misi calon dari partai tersebut, mengikuti kegiatan ibu-ibu PKK tersebut seperti arisan dan pengajian sambil berkampanye memperkenalkan pasangan calon kepala daerah tersebut.

Kader perempuan dalam partai ini banyak memotori kegiatan pelaksanaan pilkada sehigga calon dari partai ini bisa mencapai persentase tinggi. Alas an dilibatkannya perempuan dalam kegiatan partai pada pelaksanaan pilkada yaitu karena apabila dilihat dari mata pilih penduduk Jambi lebih banyak dari mata pilih perempuan dari pada laki-laki. Selain itu perempuan dinilai dalam bekerja bersifatikhlas yang tidak sama dengan laki-laki yang pada umumnya mengharapakan uang dulu baru bekerja. Maka dikeluarkanlah ide tersebut yaitu untuk mengumpulkan seluruh organisasi perempuan yang ada di Jambi untuk bergabung menjadi satu dalam suatu wadah yang dinamakan PUJI (perempuan jambi) yang bekerja sama dengan PKK dari setiap desa

yang melaksanakan kampanye dengan system door to door. Selain itu mahasiswa dan LSM semua juga dilibatkan untuk bekerja sama dalam kampanye damai tersebut.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh salah seorang pengurus partai dari PA yang mengatakan;

*“dalam program kampanye kita menyesuaikan tapi tidak terlepas dari door to door juga, dimana perempuan ikut turun juga kerumah-rumah ikut pengajian ibu-ibu. Disana kita memberikan penjelasan visi, misi tentang calon kepala daerah dari partai kita”.*  
(Chairul Naim, PAN)

Di PKB kampanye dilakukan melalui kegiatan dialogis kepada masyarakat, misalnya diadakan pertemuan antar warga, disana warga bebas mengeluarkan keluhan kesah selama kepemimpinan kepala daerah yang lama. Disitulah tim kampanye memperkenalkan calon kepala daerah dari partainya beserta visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih nantinya. Selain itu kampanye juga dilakukan ke daerah-daerah yang mengenal baik dengan sosok calon kepala daerah dari PKB tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh kader pengurus dari PKB tersebut yang mengatakan;

*“kami dari tim kampanye melakukan kampanye terutama ke daerah-daerah yang sangat mengenal baik dengan pasangan calon kepala daerah tersebut, dengan begitu kami bisa memperkirakan kekuatan dukungan bagi pasangan calon kami tersebut. Setelah itu baru kami datang ke daerah-daerah lainnya untuk memperkenalkan pasangan calon kepala daerah tersebut*  
(Yahya Usman, PKB)

Sedangkan di partai golkar kampanye lebih banyak dilakukan dengan koalisi, disamping melakukan juga program kampanye sendiri, setelah itu baru menyesuaikan dengan partai koalisi yang lain untuk memadukan misi kampanye masing-masing. Seperti halnya dengan pernyataan salah satu pengurus;

*“partai kami melakukan kampanye secara umum yang biasa dilakukan dalam kampanye. Kami juga melakukan dialog dengan organisasi kemahasiswaan. Selain itu kami melakukan kampanye koalisi dengan partai lainnya. Dalam kampanye ada*

*penggalangan masaa untk calon kepala daerah dalam bentuk temu kader dan dialog interaktif". (A. Mukti Zakaria, Golkar)*

Menurut pengakuan salah seorang kader perempuan dari partai ini yang juag dibenarkan oleh kader perempuan lainnya mereka hanya mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan secara koalisi dengan partai lain yang juga mengusung pasangan calon kepala daerah yang sama. Berikut kutipan wawancaranya;

*"kami tidak bisa berbuat banyak, hanya kegiatan kampanye secar koalisi saja yang bisa kami ikuti karena keterbatasan aktu yang kami miliki". (Sukma Bakti, Golkar)*

Kendala lain yang juga diraikan sangat menghambat kader perempuan untuk dapat beraktivitas penuh dalam kegiatan parpol terutama dalam kegiatan kampanye pikkadayaitu masalah waktu. Perempuan kesulitan dalam membagi waktu antara kegiatan rumah tangga, kerja dan kegiatan di aprtai. Sekali waktu muncul persolan dilematis dalam diri kader perempuan tersebut untuk memilih mana yang harus didahulukan antara keluarga dan kegiatan partai.

Dalam hal ini dukungan dari keluarga diraikan sangat dibutuhkan sekali untuk diri perempuan itu dapat melangkah mengikuti kegiatan partai yang kadang tidak mengenal eaktu dan tempat. Kadang sebagai pengurus mereka harus hadir dalam rapat-rapat partai yang dilakukan pada malam hari. Hal senad juga disampaikan oleh keder perempuan dari PKB yang memiliki dilema untk memilih mengikuti kegiatan di partai dan rumah tangga, seperti pernyataan berikut;

*"membagi waktu antara keluarga dan kegiatan di partai memang satu dilemma buat saya. Disatu sisi saya memiliki keluarga yang membutuhkan saya sebagai ibu rumah tangga, tapi disisi lain saya meraa bertanggung jawab terhaap partai". (Rosniah, PKB)*

Selain itu sebagai seorang warga masyarakat lingkungan sangat berpengaruh sekali dalam pemberntukan prilaku seseorang sehari-hari. Ada sebagian masyarakat yang memandang buruk terhadap aktivitas seorang perempuan didalam partai. Mereka menganggap patai adalah dunia laki-laki dan tidak pantas bagi seorang perempuan bergaul dan beraktivitas dalam dunia laki-laki tersebut. Ada juag sebagian daerah yang tidak ingin perempuan itu maju, karena mereka mengangaptidak baik melangkahi laki-laki dan menjadi pemimpin bagi laki-laki. Hal-hal seperti ini tentu saja dapat

membentuk persepsi tersendiri bagi masing-masing kader perempuan untuk dapat melangkah dan beraktivitas dalam partai politik. Hal ini dirasakan oleh kader perempuan dari PDIP, yang mengatakan;

*“masyarakat disini menilai buruk dengan aktivitas perempuan dalam partai yang apabila ada rapat yang mengharuskan pulang malam bahkan sampai pagi/dini hari”.* (Uniza, PDIP)

Pendapat yang sama juga dirasakan oleh kader perempuan dari PAN yang juga mengatakan;

*”masyarakat disini kan rata-rata awam. Selain itu ada beberapa daerah yang tidak ingin perempuan itu maju, karena hal itu sudah lama mengakar budaya seperti itu. Perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki. Dengan adanya pemahaman seperti itu maka tentu saja hal ini menghambat gerak perempuan untuk dapat mengikuti kegiatan di parpol”.* (Novi Olivia, PAN)

Persepsi yang terbentuk dalam diri kader perempuan tersebut menunjukkan bahwa kader perempuan tersebut kurang memiliki pemahaman dan wawasan terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut.

### **3. Kendala Pada Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Setelah tahapan kampanye selesai dilaksanakan maka tinggal menunggu hari pemungutan suara. Dalam hal penunjukkan saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara parpol mengirimkan masing-masing utusannya ke TPS-TPS dan tentu saja tidak menutup kemungkinan saksi dari kader perempuan. Salah satu kader perempuan dari PDIP yang pernah ditunjuk menjadi saksi dalam penghitungan suara, berikut pernyataannya;

*“saya ditunjuk untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara di salah satu TPS di Muara Jambi, saya ikui walaupun saya harus pulang pagi, dan dianggap sebagai perempuan gak benar, tetap tidak menjadi masalah bagi saya. Karena rasa tanggung jawab saya yang besar terhadap partai”.* (Uniza, PDIP)

Sedangkan di PAN dalam penunjukkan saksi dari partai untuk penghitungan suara, dimana dari tiap-tiap desa diminta kader perempuan minimal 4 orang disamping

dari laki-laki, karena perempuan dinilai jujur. Dengan begitu keterlibatan perempuan bisa maksimal dalam proses ini. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang kader perempuan yang nyaris sama dengan pernyataan kader perempuan yang lain yaitu sebagai berikut

*“untuk penunjukkan aksi diminta perempuan minimal 4 orang disamping kader laki-laki tentunya. Karena kita tahu bahwa perempuan dinilai memiliki kejujuran yang tinggi”. (Risna, PAN)*

Hal ini menunjukkan bahwa kader perempuan tetap dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh partai, dan jelas kader perempuan memiliki kemampuan untuk itu, asalkan diberikan kesempatan yang sama dengan kader laki-laki.

Pada proses pemungutan dan penghitungan suara diperlukan saksi dari masing-masing pasangan calon kepala daerah yang hal itu berarti berasal dari parpol peserta pilkada. Disini proses penunjukkan saksi dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol dimana dalam proses ini banyak didominasi oleh laki-laki sebagai mayoritas dalam partai.

Selain itu kader perempuan sebagai minoritas dalam partai merasa tidak mempunyai kemampuan dan rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan kader laki-laki dengan jumlah mereka yang minoritas tersebut. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh informan dari salah satu partai yang mengatakan;

*“jumlah kami yang sedikit tentu saja membuat kami kalah suara dari kader laki-laki dalam hal penunjukkan saksi. Perempuan dianggap memiliki sejumlah kendala untuk menjadi saksi, seperti masalah waktu”. (In Inawati, Golkar)*

Sedangkan kendala waktu dirasakan oleh kader perempuan lainnya dari PKB, karena mereka sulit untuk meninggalkan keluarga untuk mengikuti penghitungan suara yang selesai menjelang pagi hari, berikut pernyataannya;

*“kami terkadang harus mempertimbangkan untuk bisa ikut dalam penghitungan suara yang kadang baru selesai menjelang pagi hari, karena rasanya berat harus meninggalkan keluarga”. (Wiwin Alawiyah, PKB)*

Selain itu kesulitan untuk membagi waktu dan menentukan prioritas mana yang harus didahulukan antara urusan rumah tangga dan kegiatan di partai juga umumnya dirasakan oleh sebagian besar kader perempuan partai tersebut disamping juga



kurangnya kesiapan mental untuk mengambil resiko dalam suatu usaha politik yang mereka lakukan seperti dalam hal pencalonan yang mengharuskan untuk mengeluarkan sejumlah dana atau materi yang cukup besar untuk membiayai kegiatan kampanye nantinya dan kader perempuan tidak memiliki keberanian untuk menanggung resiko terburuk nantinya yang akan terjadi setelah pilkada selesai dilaksanakan yaitu kalah dalam pemilihan. Hal ini berpengaruh sekali terhadap aktivitas politik kader perempuan tersebut.

Sejumlah kendala yang dihadapi oleh kader perempuan tersebut seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius lagi dari partai dan kader laki-laki dalam partai tersebut, karena pada dasarnya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan kader laki-laki untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan parpol.

## **B.Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Kegiatan Parpol**

### **1. Upaya yang Dilakukan Oleh Kader Perempuan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala untuk dapat beraktivitas dalam kegiatan parpol. Menurut *Ganis Styaningrum* ada beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain : meningkatkan kualitas diri dari kaum perempuan itu sendiri dengan berbagai pengetahuan, memperkuat partisipasi peran perempuan karena dengan adanya perempuan yang duduk di elit politik akan ikut menentukan segala kebijakan di tingkat grass root, untuk menunjukkan peran perempuan yang lebih aspiratif sehingga perempuan tidak menjadi obyek pembangunan semata, melibatkan perempuan dalam aktivitas politik agar perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik, upaya ini juga berfungsi untuk mendudukan kembali perempuan sebagai warga Negara yang utuh, perlu adanya sikap arif dari masyarakat luas khususnya kaum laki-laki untuk bisa menerima perempuan sebagai patner kerja atau mitra kkerja yang baik, adanya dukungan dan jaminan dari pemerintah terhadap kebijakan yang sensitive gender.

Upaya yang dilakukan oleh kader perempuan yang didapat dari penelitian ini antara lain : meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai politik, mengadakan kegiatan bersama LSM, melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan partai ataupun secara pribadi. Namun upaya yang dilakukan memerlukan dukungan semua pihak, tidak saja diri pribadi dari kader tapi juga keluarga

sebagai lingkungan terdekat. Hal ini dikarenakan para perempuan merupakan bagian dari rumah tangga yang memerlukan izin dari suami. Dukungan lainnya harus datang dari parpol itu sendiri, karena parpol merupakan wadah bagi mereka untuk dapat menyalurkan segala bakat politik dan semua kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan parpol.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Parpol**

Dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh kader perempuan tersebut selain upaya yang dilakukan oleh kader itu sendiri, parpol sebagai tempat beraktifitas kader perempuan tersebut juga melakukan berbagai upaya antara lain : mendirikan suatu badan otonom yang khusus diperuntukkan bagi perempuan, mengikutkan dalam kegiatan partai seperti kampanye dan pencalonan, melakukan pelatihan yang diikuti kader perempuan untuk meningkatkan wawasan politiknya, menggalang upaya dengan lembaga – lembaga perempuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dan melakukan seminar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat partai telah menunjukkan perhatian yang cukup tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi kader perempuan dari partainya. Dan hal ini tentu saja diharapkan dapat membantu perempuan mengatasi berbagai kendala yang mereka rasakan selama ini dalam mengikuti kegiatan partai.

## **BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kendala internal yang dihadapi oleh kader perempuan untuk bisa terlibat penuh dalam kegiatan politik partai pada proses pelaksanaan Pilkada sebagai berikut :

1. Kesulitan perempuan untuk membagi waktu antara kegiatan di partai dan dalam keluarga karena keputusan-keputusan penting dalam partai umumnya dihasilkan pada rapat-rapat partai yang dilakukan pada malam hari. Hal ini membuat kader perempuan tersebut kesulitan untuk dapat mengikuti dan akibatnya mereka tidak bisa ikut terlibat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dalam partai.
2. Kesiapan mental perempuan yang tidak berani untuk mengambil resiko dalam usaha politik yang mereka lakukan, seperti menyiapkan sejumlah dana yang besar untuk bisa maju dalam pemilihan dan juga rasa tidak percaya pada

kemampuan diri dan rendah diri untuk melakukan dan menerima sejumlah tanggung jawab yang besar.

3. Pemahaman dan wawasan politik yang dimiliki kader perempuan masih kurang terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut. Hal ini menyebabkan di dalam diri perempuan tersebut terbentuk persepsi/pandangan yang menganggap bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki seperti menjadi pemimpin. Persepsi seperti ini masih menjangkiti diri perempuan karena kurang memahami pentingnya peranan mereka dalam mempengaruhi pengambilan keputusan politik partai.
4. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh kader perempuan untuk dapat mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan pemahaman dan wawasan dibidang politik melalui kegiatan pelatihan kader, seminar dan diskusi politik. Untuk dapat membagi waktu, kader perempuan berusaha untuk sharing dengan keluarga dan teman kerja bareng tentang kesibukan di partai dan dalam hal kampanye berusaha memberikan bantuan moril dan materil seperti menjadi tenaga sukarela dan membantu dengan dana pribadi.
5. Sedangkan upaya yang dilakukan parpol dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mendirikan badan otonom di bawah partai yang banyak melakukan kegiatan kewanitaan, memberikan kesempatan kepada perempuan sebagai juru kampanye, berusaha mengadakan rapat pertemuan partai pada siang hari, mengadakan diklat dan seminar tentang politik perempuan.

## **2. Saran**

Dengan melihat hasil penelitian di atas yaitu sejumlah kendala yang dihadapi oleh kader perempuan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan parpol, maka seharusnya partai meningkatkan lagi kepeduliannya terhadap permasalahan yang dihadapi kader perempuan tersebut dengan serangkaian kegiatan yang benar-benar dirasakan oleh kader perempuan tersebut.

Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi kader perempuan harus lebih giat lagi meningkatkan kesadaran pemahaman dan pengetahuan serta kemampuan mereka di bidang politik melalui

berbagai kegiatan seperti pendidikan politik, seminar, pelatihan dan lokakarya tentang perempuan dan politik dalam rangka peningkatan kualitas SDM mereka.

2. Politik yang ada diharapkan tidak hanya sekedar memberikan kesempatan bagi kader perempuan untuk berpartisipasi tetapi harus lebih memperhatikan lagi bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh kader perempuan selama ini di dalam partai seperti memberdayakan dan memberikan dorongan kepada kalangan perempuan baik individu maupun kelompok untuk memberanikan diri tampil dalam rangka mengisi jabatan-jabatan strategis di dunia politik. Dengan begitu akan menjadi jelas bagi partai hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh kader perempuan untuk peningkatan partisipasinya di dalam partai.
3. Ketika nantinya terjadi peningkatan partisipasi politik dari kader perempuan maka diharapkan lagi mereka menjadi lebih peka dan sensitive dalam menyampaikan aspirasinya dan memahami lebih lanjut lagi permasalahan perempuan yang banyak terjadi di dalam masyarakat.
4. Untuk langkah lebih lanjut mengenai permasalahan ini maka penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan yaitu berkaitan dengan bagaimana sumbangsih yang nyata dapat diberikan kader perempuan dengan keaktifannya di parpol terhadap sejumlah permasalahan perempuan yang masih sering terjadi di dalam masyarakat saat ini.

## Daftar Pustaka

### *Buku-buku Utama*

Amal, DR. Ichlasul, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana : Yogyakarta, 1988.

Asri Harahap MM, DR.Ir.H. Abdul, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, PT. Pustaka Cidesindo : Jakarta, 2005.

Budiardjo, Prof. Miriam (ed), *Partisipasi dan Partai Politik* , Yayasan Obor Indonesia : Jakarta, 1998.

*Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 1992.

*Demokrasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta,1998.

C.Ollenburger, Jane, dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 1996.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta 2001.

Huntington, Samuel P, dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Rineka Cipta : Jakarta, 1994.

Subono, Nur Iman, *Perempuan dan Partisipasi Politik*, Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan dan The Japan Fondation : Jakarta, 2003.

Sajogyo, Pudjiwati, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, CV. Rajawali : Jakarta , 1993.

### ***Buku Metodologi***

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES : Jakarta, 1989.

Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung ,1997.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara : Jakarta, 1989.

### ***Undang-undang Dan Peraturan-peraturan Lainnya***

Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jambi, *Daftar Nama Calon Legislatif Provinsi Jambi Pada Pemilu 2004*.

*Daftar Tim Kampanye Pilkada Provinsi Jambi*, 2005.

UU No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*

PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005 Tentang *Perubahan Atas UU No.32 tahun 2004*.

PP No.6 Tahun 2005 Tentang *Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.

PP RI No.17 Tahun 2005, Tentang *Perubahan Atas PP No.6 Tahun 2005*

Keputusan KPU Provinsi Jambi No.1 Tahun 2005 Tentang *Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi.*

***Jurnal, Media Massa dan Lainnya***

*Jurnal Perempuan* Edisi 34, Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan dan The Ford Foundation, Jakarta, 2004.

Harian *KOMPAS*, Tgl 10 Februari 2005.

Yulianis, Novi, *Motivasi Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Politik*, **SKRIPSI**, FISIP UNAND 2005.